

**PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Pada Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**

Hengki Ariawan, Subur Bahri, Sri Wilujeng

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, UNTAG, Banyuwangi

E-mail: hengkiariawann@gmail.com

Abstract: *Effect Of The Implementation Of The Principles Of Good Governance On The Performance Of The Village Government (Case Study In Wonosobo Village, Srono District, Banyuwangi Regency). In the current era of globalization, the Indonesian state in terms of governance is experiencing an advancement in the times. Therefore, the government is demanded for reforms in the government system, both those in the center and those in the regions, including in the village government. But in the office of the village head Wonosobo still not fully apply the principles of good governance, such as lack of responsibility with the work provided and lack of transparency in the administration of government. The research method is quantitative. The types of data used are questionnaires, interviews and documentation. Data analysis used product moment correlation statistics which resulted in the influence of the implementation of the principles of good governance on the performance of the village government. The benefit of this research is to provide information and input to the wonosobo village government regarding the implementation of the principles of good governance on the performance of the village government so that they can provide more optimal results of service.*

Keywords: *good governance, village government performance*

Abstrak: **Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).** Di era globalisasi saat ini, negara Indonesia dalam hal pemerintahan mengalami sebuah kemajuan zaman. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk reformasi didalam sistem pemerintahan, baik yang ada dipusat maupun yang ada didaerah termasuk di pemerintahan desa. Namun di kantor kepala desa wonosobo masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti kurangnya tanggungjawab dengan pekerjaan yang diberikan dan kurang transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan statistik korelasi product moment yang menghasilkan ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah desa. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah desa wonosobo terkait pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah desa sehingga dapat memberikan hasil pelayanan yang lebih maksimal.

Kata kunci: *good governance, kinerja pemerintah desa*

Pendahuluan

pemerintah desa saat ini tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga dituntut untuk bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, semangat reformasi seharusnya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah desa dalam mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan yaitu dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good*

governance. namun saat ini, pemerintah desa masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa adalah pelayanannya. Pada kenyataannya, penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang belum memadai. Buktunya adalah seringkali pada saat masyarakat membutuhkan layanan yang cepat tetapi yang didapatkan

sebaliknya, yaitu lambat, berbelit-belit dan dalam situasi seperti ini yang membuat masyarakat merasa bahwa pelayanan buruk atau tidak baik sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan-pengaduan ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Seharusnya dengan terselenggarakannya *good governance*, kinerja pemerintah desa dapat lebih baik dari sebelumnya.

Di Kantor Kepala Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi khususnya, masih belum sepenuhnya melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti kurangnya tanggungjawab dengan pekerjaan yang diberikan contohnya kurang adanya kesadaran petugas tentang kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, kemampuan petugas yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan atau yang diberikan kepadanya. Akibatnya hasil kerja yang dicapai tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Selain itu juga kurang transparan (keterbukaan informasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui yang akan dan telah diambil oleh pemerintah desa. Mulai dari dana ataupun keputusan yang lainnya.

Oleh karena itu, kinerja pemerintah desa kurang optimal. Kurang optimal seperti menunda-nunda pekerjaan, sistem dan prosedur yang berbelit-belit serta kurang keterampilan pemerintah desa wonosobo dalam melayani kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah adakah pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan masukan kepada Kantor Kepala Desa Wonosobo/Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan

prinsip-prinsip *good governance* dalam mengukur kinerja pemerintah desa.

Tinjauan Pustaka

1. Good Governance

Governance lebih mengarah kepada sebuah serangkaian interaksi antara pemerintah dengan masyarakat alam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan *good governance* merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dimana prinsip demokrasi menjadi sebuah patokannya atau acuannya. Tujuan diadakannya *good governance* ini adalah agar tidak adanya sebuah penyimpangan-penyimpangan yang menguntungkan salah satu pihak yang terjadi didalam sebuah pemerintahan. penyimpangan tersebut berupa korupsi, kolusi dan nepotisme. Didalam hal ini pemerintah dituntut untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban dan transparansi yang tepat, jelas dan nyata.

Sedarmayanti (2004, h.7) menyimpulkan bahwa terdapat 4 (Empat) prinsip utama yang dapat memberikan gambaran tentang *good governance*:

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi: pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan: menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum: pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Menurut Wiguna (2015, h.278) kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat

mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan berpihak kepada rakyat. Impelementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah.

2. Akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011, h.89) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tuntutan akuntabilitas tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah menggunakan sumber dana dari masyarakat. Sehingga akan terwujudkan sebuah tujuan utama reformasi sektor publik. sektor publik merupakan sebuah sektor yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Ellwood dalam Putra (2013, h.17-18) Terdapat 4 (Empat) dimensi akuntabilitas didalam lembaga sektor publik yang harus dipenuhi antara lain:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran (*Accountability for probity*) dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*Abuse of power*), sedangkan kuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan

pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambatan dalam pelayanan. Pengawasan terhadap tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Sedarmayanti (2007, h.23) terdapat beberapa kriteria prinsip-prinsip akuntabilitas, kriteria tersebut adalah:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.

2. Adanya sanksi yang diterapkan pda setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

3. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dari pemerintah.

Menurut Mahmudi (2011, h.17) transparansi adalah sebuah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Tujuan transparansi adalah untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah memberikan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah peraturan,

dan hasil yang telah dicapai dalam pemerintahan.

Menurut Kristanten (2006, h.73) indikator dalam sebuah transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

4. Kinerja pemerintah desa

Kinerja merupakan sebuah hasil dari sebuah pekerjaan yang telah ditentukan sehingga akan tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Tujuan dari sebuah kinerja merupakan tolok ukur atau penilaian kerja bagi organisasi (pemerintahan) untuk dapat menilai kualitas dari seorang pegawai (pemerintah).

Menurut Mangkunegara (2009, h.67) bahwa kinerja yaitu sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Untuk mengukur sebuah kinerja diperlukan indikator. Dalam hal ini indikator dalam sebuah kinerja dalam birokrasi publik menurut Pasolog (2013, h.178-179), indikator tersebut adalah:

1. Produktivitas

Tidak hanya mengukur sebuah tingkat efisiensi saja, tetapi juga mengukur efektivitas sebuah pelayanan. Produktivitas pada umumnya dapat dipahami sebagai rasio antara input dan output.

2. Kualitas layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.

3. Responsivitas

Kemampuan sebuah birokrasi dalam mengenali sebuah kebutuhan masyarakat, menyusun agenda pelayanan dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan sebuah kemampuan birokrasi dengan menjalankan sebuah misi

dan tujuan birokrasi tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

4. Responsibilitas

Dalam hal ini menjelaskan apakah pelaksanaan sebuah kegiatan birokrasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Tujuannya untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Menurut Sugiyono (2015, h.14) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang didasarkan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap *sample* (sampel) dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai, analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif/bisa dikur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya.

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam bidang akuntabilitas dan transparansi (keterbukaan informasi) dan kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

Lokasi penelitian di Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan untuk situs penelitian pada Kantor Kepala Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Teknik pemilihan responden menggunakan rumus slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus *representative* agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Sumber data diperoleh dari data utama dan data pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Dari hasil perhitungan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa dengan analisis data *product moment* menghasilkan angka sebesar 0,231. Apabila dibandingkan dengan harga kritik r tabel *product moment* untuk $N=78$ adalah sebesar 0,223 dengan taraf signifikansi 95% ternyata hasil analisis data tersebut melebihi harga kritiknya ($0,231 > 0,223$).

Dengan demikian, maka hipotesis kerja (Hi) yang menyatakan ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi diterima. Sebaliknya hipotesis nihil (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ditolak.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Dari hasil perhitungan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa dengan analisis data *product moment* menghasilkan angka sebesar 0,247. Apabila dibandingkan dengan harga kritik r tabel *product moment* untuk $N=78$ adalah sebesar 0,223 dengan taraf signifikansi 95% ternyata hasil analisis data tersebut melebihi harga kritiknya ($0,247 > 0,223$).

Dengan demikian, maka hipotesis kerja (Hi) yang menyatakan ada pengaruh transparansi terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi diterima. Sebaliknya hipotesis nihil (H0) yang

menyatakan tidak ada pengaruh transparansi terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ditolak.

3. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Dari hasil perhitungan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah desa dengan analisis data *product moment* menghasilkan angka sebesar 0,310. Apabila dibandingkan dengan harga kritik r tabel *product moment* untuk $N=78$ adalah sebesar 0,223 dengan taraf signifikansi 95% ternyata hasil analisis data tersebut melebihi harga kritiknya ($0,310 > 0,223$).

Dengan demikian, maka hipotesis (Hi) yang menyatakan ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi diterima. Sebaliknya hipotesis nihil (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ditolak.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja Pemerintah Desa Wonosobo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2011) **Manajemen Pemerintahan Daerah**. Makasar, Graha Ilmu.
- Diponegoro, Universitas (2012) **Menurut Ellwood 1993 Dalam Putra 2013 Terdapat Empat Dimensi Akuntabilitas**. Diakses melalui <https://www.coursehero.com/file/p21d8gok/Menurut-Ellwood-1993-dalam-Putra-2013-terdapat-empat-dimensi-akuntabilitas/> [diakses pada tanggal 14 Februari 2019].
- Kristianten (2006) **Transparansi Anggaran Pemerintah**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mahmudi (2011) **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta, UII Press.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu (2009) **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani (2013) **Kepemimpinan Birokrasi**. Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti (2004) **Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)**. Bandung, Mandar Maju.
- Sedarmayanti (2007) **Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja**. Bandung, Mandar Maju.
- Sugiyono (2015) **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)**. Bandung, Alfabeta.

Wiguna, Budi (2015) **Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.** Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha.